

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kampung adalah pemukiman penduduk dengan karakter sosial ekonomi masyarakat yang berbeda-beda. Kampung muncul ketika sektor pekerjaan di bidang pertanian tergusur oleh pekerjaan di bidang perindustrian dan jasa muncul. Karakteristik demografi kampung berada di wilayah perkotaan, dengan jumlah penduduk dan perumahan hunian yang padat, tapi ada juga kampung yang berada di pinggiran kota, dimana karakter demografisnya terletak di pinggir jalan raya pinggiran kota yang selalu berdekatan dengan pusat pusat perindustrian dan pelayanan jasa masyarakat.

Menurut Jo Santoso tentang perkembangan kampung di Indonesia tak lepas dari campur tangan penjajahan kolonial Belanda di Indonesia, karena istilah kampung merupakan peninggalan pemerintah kolonial Belanda ketika menjajah di Indonesia. Perkembangan kampung di Indonesia tak lepas dari perkembangan kota yang ada, ketika kota-kota besar di Indonesia mengalami perkembangan tiga masa yakni dari masa tahun 1930-an sewaktu dunia mengalami krisis ekonomi dan krisis gula, kemudian periode masa tahun 1960-an saat hancurnya struktur ekonomi warisan kolonial dan kemudian periode masa tahun 1970-an sewaktu masa pertumbuhan ekonomi sebagai akibat boom minyak dan proses industrialisasi (Santoso, 2006 : 153).

Maka hal itu juga membuat kampung yang ada di Indonesia juga mengalami perkembangan, ketika kota mengalami perubahan maka struktur internal kampung juga mengalami perubahan. Kampung menyesuaikan struktur urban tradisionalnya dengan tuntutan kota modern. Terutama dalam pencairan karakter struktur kampung yang semula homogen dan berorientasi teritorial (homogen teritorial).

Isu permukiman kampung selalu menonjol. Terdapat suatu kenyataan bahwa kultur politik di Indonesia masih suka mengkotak-kotakkan kampung ke dalam kantong-kantong ideologi politik yang semu-nasionalisme, agama, premanisme.

Selanjutnya, masyarakat kampung secara intelektual dikebiri dalam slogan-slogan yang tak ada hubungannya dengan peningkatan kesejahteraan mereka. Tak satupun kelompok ideologi politik ini peduli akan masalah perumahan atau permukiman urban. Kita dapat melihat kampung menjadi sangat penting pada saat suara mereka sangat dibutuhkan dalam proses pemilihan umum. Setelah proses pemilihan umum berakhir tidak ada lagi yang memikirkan mengenai perbaikan permukiman kampung kota. Penduduk selalu melakukan sendiri perbaikan lingkungannya, secara swadaya.

Di Yogyakarta, seperti yang dipaparkan oleh Yoshi Fajar Kresno Murti dan Ani Himawati dalam makalah berjudul Kampung Masa Depan Kota untuk keperluan Diskusi di LKPSM NU Jombang, yang disebut kampung, barangkali bisa menjadi sebuah tempat bagi orang yang kurang beruntung untuk tinggal di kota. Kampung dapat menjadi simbol untuk menampung sebagian besar orang

yang datang dan tinggal di kota, yang tak lain adalah golongan masyarakat menengah ke bawah. Sebuah fakta, kampung mampu menampung beragam orang dengan beragam pekerjaan, beragam latar belakang, tanpa prosedur berbelit-belit, dan murah. Ketika kampung menjadi ruang hidup bagi sebagian besar warga kota (dan terutama warga kota yang kurang beruntung), bisa dikatakan bahwa kampung adalah kenyataan kota. Kampung adalah ruang sosial paling nyata ketika berbicara tentang kota. Kampung menjadi ruang bertahan hidup bagi sebagian besar masyarakat kota, menjadi pabrik siasat beradu nasib, menjadi arena berkomunitas, tempat interaksi sosial paling nyata di kota. Kampung adalah gudang segala sektor informal kota.

Masalahnya adalah, kota selalu dibayangkan menjadi wilayah ideal, yang mengejar kenyamanan segelintir orang untuk dipaksakan dalam kenyataan melalui pembangunan-pembangunan. Sedangkan kampung, sekali lagi, seringkali dipandang mewakili segala ketidakteraturan, kekotoran, sekumpulan orang yang tidak tertib (karena beragamnya pekerjaan dan latar belakang), dan karena 'kemiskinannya'. Karena cara pandang terhadap kampung yang demikian, posisi kampung dalam pengembangan perkotaan selama ini adalah:

- Kampung selalu menjadi obyek pembinaan, pembangunan, dan tepatnya adalah sasaran proyek. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 60-an dengan ragam proyek fisik maupun non fisik, dengan harapan bahwa warga kampung (yang seringkali disebut warga miskin) bisa menjadi lebih bersih, lebih tertib, lebih teratur, dan segala kenormalan dengan ukuran atau kaca mata masyarakat menengah ke atas. Segala upaya

‘pembangunan dan pemberdayaan’ dilakukan terutama oleh pemerintah, dan berbagai pihak, termasuk lsm. Kampung selalu menjadi bulan-bulanan proyek, menjadi kelinci percobaan, agar tidak mengotori kota.

- Kampung menjadi korban, ketika ada kepentingan yang lebih besar atau tepatnya menguntungkan bagi kota. Lihat bagaimana maraknya penggusuran kampung di tahun 80-an dan terutama sejak 90-an sampai sekarang di kota-kota besar. Karena kampung dipandang sebagai sekumpulan orang tidak berguna, kriminal, dan susah diatur, maka seolah layak untuk disingkirkan ketika lahan kampung tersebut akan bisa lebih menguntungkan jika dibangun atau menjadi bukan kampung. Lihat saja bagaimana kasus penggusuran kampung di Jakarta, Surabaya, dan sedikit di Jogjakarta (www.ypr.or.id).

Dari uraian di atas, dapatlah kita pahami bahwa terjadinya seluruh permasalahan tersebut berkaitan erat dengan rendahnya tingkat keterlibatan atau partisipasi masyarakat. Rendahnya partisipasi tersebut pada akhirnya telah membentuk sebagai sebuah lingkaran yang sulit ditentukan ujung-pangkal penyebabnya.

Yang terpenting saat ini adalah membangun kembali kesadaran bahwa partisipasi rakyat dalam perencanaan lingkungan hidupnya bukan hadiah yang diberikan secara cuma-cuma oleh penguasa, melainkan hasil perjuangan bersama dari berbagai unsur masyarakat yang berpihak kepada rakyat yang lemah dan

dilemahkan. Agaknya perlawanan dan gerakan-gerakan sosial untuk dapat meraih hak-hak rakyat dalam ikut serta menentukan nasibnya menjadi semakin penting untuk digiatkan. Dalam perlawanan dan gerakan gerakan sosial demi untuk meraih hak-hak masyarakat yang belum terpenuhi ini, maka muncul berbagai macam lembaga yang ada di masyarakat sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah maupun sebagai lembaga independent atau dengan kata lain tidak terkait dengan pemerintah ataupun organisasi politik.

Menurut Horton lembaga itu adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting, atau secara formal sekumpulan kebiasaan atau tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia. Lembaga adalah proses terstruktur atau tersusun untuk melakukan berbagai kegiatan tertentu (Horton dan Hunt, 1991: 244). Seorang pengamat sosial dari Prancis, yang bernama Alexis De Tocqueville (1805-1859), berpendapat bahwa semakin meningkatnya pendidikan dan kesadaran berpolitik, terutama ketika terjadi ketidakpuasan di lapisan masyarakat, timbullah gejala baru dalam sebuah lembaga yang demokrasi yaitu partisipasi. Partisipasi ini timbul dari bawah, di kalangan masyarakat yang gelisah. Dalam kunjungannya ke Amerika pada tahun 30-an abad ke 19, De Tocqueville melihat timbulnya perkumpulan dan perhimpunan sukarela (*voluntary association*). Selain menyelenggarakan kepentingan mereka sendiri, dengan melakukan berbagai kegiatan inovatif, perkumpulan dan perhimpunan itu juga bertindak sebagai pengimbang kekuatan negara (*as a counter-weights to state power*). Ada tiga macam peranan yang dijalankan oleh perkumpulan dan perhimpunan itu. *Pertama*, menyaring dan

menyiarkan pendapat dan rumusan kepentingan yang jika tidak dilakukan pasti tidak akan terdengar oleh pemerintah atau kalangan masyarakat umum. *Kedua*, menggairahkan dan menggerakkan upaya-upaya swadaya masyarakat dari pada menggantungkan diri pada prakarsa negara. *Ketiga*, menciptakan forum pendidikan kewarganegaraan, menarik masyarakat. Untuk membentuk usaha bersama (*co-operative ventures*), dan dengan demikian mencairkan sikap menyendiri (*isolatif*) serta membangkitkan tanggung jawab sosial yang lebih luas. Perkumpulan dan asosiasi itulah yang kemudian menjadi *sokoguru* masyarakat madani. Dan apa yang disebut oleh de Tocqueville itu tak lain adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang dalam masyarakat Barat dewasa ini disebut sebagai *Non Governmental Organization* (NGO) atau ORNOP (Organisasi Non Pemerintah) dan perkumpulan sukarela (*Voluntary Association*) (Anwar S, 2005).

Yayasan Pondok Rakyat adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat, yang bergerak dalam bidang advokasi dan pemerdayaan masyarakat yang terpinggirkan. Visi dari Yayasan Pondok Rakyat (YPR) adalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebagaimana telah dipaparkan di atas maka perumusan masalah yang akan dibahas di sini adalah terciptanya tata masyarakat dan lingkungan perkotaan yang adil melalui pemihakan kepada kelompok masyarakat yang lemah dan dilemahkan, dan misi yang dijalankan oleh Yayasan Pondok Rakyat (YPR) adalah meningkatkan kapasitas masyarakat secara partisipatif melalui pengembangan suatu sistem informasi, pengorganisasian masyarakat, dan peran serta dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Saat ini kerja sosial Yayasan Pondok Rakyat ini berada di kampung Bumen yang masih masuk wilayah di Kota Gede Yogyakarta. Di kampung Bumen ini Yayasan Pondok Rakyat melakukan pemberdayaan masyarakat serta advokasi hak-hak warga kampung Bumen, yang mana tujuannya agar warga kampung Bumen berdaya terhadap permasalahan ekonomi.

B. Rumusan Masalah

”Bagaimana Konsep Yayasan Pondok Rakyat Dalam Kerja Pendampingan dan Pemberdayaan dengan mengkaji Program Srawung Kampung?”

C. Tujuan Dan Manfaat

C.1 Tujuan

C.1. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui:

1. Perumusan konsepsi Yayasan pondok Rakyat (YPR) terhadap situasi dan permasalahan perkampungan di Kota Madya Jogjakarta dalam rangka membangun masyarakat perkampungan sebagai bagian dari masa depan kota.
2. Pendekatan yang dilakukan Yayasan Pondok Rakyat (YPR) terhadap permasalahan perkampungan dalam rangka memperoleh indentifikasi problem-problem sosiologisnya.

C.2. Manfaat penulisan skripsi ini meliputi:

Penelitian Skripsi ini diharapkan mempunyai manfaat secara akademik maupun praksis.

C.2.1. Secara akademik penelitian yang secara spesifik berkenaan dengan analisis perilaku sosial serta perubahan sosial yang terjadi.

C.2.2. Ditingkat praksis penulis berharap penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para pemerhati masalah pemuda dan kewiraswastaan dalam melihat peluang dan potensi pengembangan usaha.

D. Kerangka Konsep

Dalam latar belakang telah digambarkan bahwa kampung adalah ruang bertahan hidup di kota bagi sebagian besar warga kota yang tak lain adalah kaum miskin dan sering diposisikan sebagai objek dan siap dikorbankan. Berikut penulis akan memaparkan, apa itu kampung dan apa itu kota untuk memberikan gambaran secara definitif.

Menurut Putri Suryandari, ST. M.Ars dalam *Geliat Nafas Kampung Kota Sebagai Bagian Dari Permukiman Kota*, terdapat beberapa pengertian kampung seperti tersebut di bawah ini:

- Kampung merupakan kawasan hunian masyarakat berpenghasilan rendah dengan kondisi fisik kurang baik. (Rutz, 1987: 76);

- Kampung merupakan kawasan permukiman kumuh dengan ketersediaan sarana umum buruk atau tidak ada sama sekali, kerap kawasan ini disebut 'slum' atau 'squater' (Turner 1972);
- Kampung merupakan lingkungan tradisional khas Indonesia, ditandai ciri kehidupan yang terjalin dalam ikatan kekeluargaan yang erat (Herbasuki, 1984: 112);
- Kampung kotor yang merupakan bentuk permukiman yang unik, tidak dapat disamakan dengan 'slum' dan 'squater' atau juga disamakan dengan permukiman penduduk berpenghasilan rendah (Baros, 1980 : 23).

Sedang pengertian kota Menurut Prof. Drs. R. Bintarto Kota adalah suatu sistem jaringan kehidupan manusia dengan kepadatan penduduk yang tinggi, strata sosial ekonomi yang heterogen, dan corak kehidupan yang materialistik (www.scribd.com).

Pendampingan dan Pemberdayaan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh manusia.

Menurut Parsudi Suparlan, bahwa kemiskinan adalah:

Standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Suparlan, 1984: 12).

Standar hidup kehidupan yang rendah ini secara langsung nampak pengaruhnya pada tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga

diri mereka yang tergolong sebagai orang miskin. Pada masyarakat modern saat ini, kemiskinan menjadi suatu masalah sosial karena sikap masyarakat yang membenci kemiskinan. Hal ini disebabkan ketika kondisi penduduk dalam suatu kelompok dalam masyarakat tersebut miskin, maka akan memunculkan suatu masalah sosial dalam masyarakat tersebut, seperti munculnya gelandangan, pengemis, prostitusi atau pelacuran, perampokan yang semuanya itu merupakan perilaku yang menyimpang yang ada dalam masyarakat miskin, khususnya masyarakat miskin perkotaan.

Pendampingan dan pemberdayaan adalah konsep yang saling berkaitan. Karena hampir tak mungkin pemberdayaan tanpa pendampingan. Keduanya berjalan bersamaan. Pemberdayaan yang ideal adalah pemberdayaan yang bersifat partisipatoris, yakni pendampingan-pemberdayaan yang melibatkan masyarakat itu sendiri. Pendampingan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dan dapat bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan dalam kelompok yang lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan dan mengontrol. Kata pendampingan lebih bermakna pada kebersamaan, kesejajaran, samping menyamping, dan oleh karenanya kedudukan antara keduanya sederajat(pendamping dengan yang didampingi), sehingga tidak ada dikotomi antara atasan dan bawahan. Hal ini membawa aplikasi bahwa peran pendamping hanya sebatas memberikan alternative, saran dan bantuan konsultatif dan tidak pada pengambilan keputusan (BPKB Jawa timur. 2001;5).

Pendamping berarti bantuan dari pihak luar, baik perorangan maupun kelompok untuk menambah kesadaran alam rangka pemenuhan kebutuhan dan

pemecahan permasalahan kelompok. Pendamping diupayakan untuk menumbuhkan keberdayaan dan kewaspadaan agar masyarakat yang didampingi dapat hidup secara mandiri.

Jadi pendampingan merupakan kegiatan untuk membantu individu atau kelompok yang berangkat dari kebutuhan dan kemampuan kelompok yang didampingi dengan mengembangkan proses interaksi dan komunikasi dari, oleh, dan untuk anggota kelompok, serta mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas kelompok dalam rangka tumbuhnya kesadaran sebagai manusia utuh, sehingga dapat berperan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Pendampingan sendiri ada dalam suatu pemberdayaan masyarakat, dimana menurut Lukman Sutrisno dalam Jacob, pemberdayaan masyarakat atau *empowerment* adalah :

“Merubah kondisi program pembangunan yang sudah ada dengan cara memberi kesempatan pada kelompok orang miskin untuk merencanakan dan kemudian melaksanakan program pembangunan yang telah dipilihnya, serta memberikan kesempatan pada kelompok orang miskin untuk mengelola dana pembangunan dengan baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak lain”(Jacob, 2000, 185-186).

Dalam perjalanan pemberdayaan di masyarakat, ada dua kecenderungan dalam proses pemberdayaan yaitu:

1. *Proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar mampu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian. Proses ini disebut kecenderungan primer.*
2. *Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar*

mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog(Pranarka, 1996: 56-57).

Pemberdayaan masyarakat itu sendiri bertujuan agar masyarakat berdaya atau mampu untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Menurut Edi Suharto, PhD, pendampingan sosial sangat menentukan keberhasilan program. Peran pendamping umumnya mencakup empat peran utama, yaitu: fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, dan peran-peran teknis bagi masyarakat miskin yang didampinginya.

1. Fasilitator. Merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran ini antara lain menjadi model, melakukan mediasi dan negosiasi, memberi dukungan, membangun konsensus bersama, serta melakukan pengorganisasian dan pemanfaatan sumber.
2. Pendidik. Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan peran pendidik.
3. Perwakilan masyarakat. Peran ini dilakukan dalam kaitannya dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama

dan demi kepentingan masyarakat dampungannya. Pekerja sosial dapat bertugas mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja.

4. Peran-peran teknis. Mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis. Pendamping dituntut tidak hanya mampu menjadi ‘manajer perubahan’ yang mengorganisasi kelompok, melainkan pula mampu melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar, seperti; melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, memberi konsultasi, dan mencari serta mengatur sumber dana. (<http://www.policy.hu/suharto>)

Konsep pemberdayaan mulai menjadi diskursus pembangunan, ketika orang kemudian mulai mempertanyakan makna pembangunan. Di Eropa, wacana pemberdayaan muncul ketika industriliasasi menciptakan masyarakat penguasa faktor produksi dan masyarakat yang pekerja yang dikuasai. Sedangkan di negara-negara sedang berkembang, wacana pemberdayaan muncul ketika pembangunan menimbulkan disinteraksi sosial, kesenjangan ekonomi, degradasi sumber daya alam, dan *alienasi* masyarakat dari faktor produksi oleh penguasa (Priyono, 1996).

Seperti disebut di atas pemberdayaan masyarakat yang bersifat partisipatoris bercirikan ikut melibatkan masyarakat dalam merumuskan, mengelola kebijakan yang akan diambil. Adapun Soetrisno dan Dove (1988)

menyebutkan ciri-ciri pemberdayaan masyarakat yang partisipatoris dalam hal pembangunan termasuk pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Melibatkan ide-ide atau inisiatif yang tumbuh dari bawah dan meluas masuk ke atas ke dalam birokrasi pemerintah.
2. Adanya *bargaining power* masyarakat dalam perencanaan pembangunan
3. Adanya sikap para perencana untuk melihat proses perencanaan sebagai learning process atau belajar dari pengalaman masyarakat setempat.

Menurut MG Budi Rahayu dalam Pemberdayaan, beberapa faktor yang sering mempengaruhi kegagalan proyek pada masyarakat antara lain, yaitu:

- (1) Ketidaktepatan antara kebutuhan masyarakat dan bantuan yang diberikan
- (2) Paket proyek tidak dilengkapi dengan ketrampilan yang mendukung
- (3) Tidak ada kegiatan monitoring yang terencana
- (4) Tidak ada kelembagaan di tingkat masyarakat yang melanjutkan proyek (www.binaswadaya.org).

Tujuan diadakannya pendampingan dan pemberdayaan adalah memandirikan masyarakat yang didampingi. Adapun kemandirian sosial dapat dipahami sebagai, keadaan masyarakat yang berdaya dan mampu mewujudkan cita-citanya secara sendiri dalam artian tanpa adanya pendamping (www.pidra-indonesia.org).

Menurut Bambang Ismawan dalam Kemandirian, Suatu Refleksi, Kemandirian (*self-reliance*) adalah suatu konsep yang dirancang secara sistematis agar individu maupun masyarakat menjadi subyek yang berdaya. Walaupun kemandirian yang sering dihubungkan dengan pembangunan juga dianut oleh negara-negara yang telah maju secara ekonomi, tetapi konsep ini lebih banyak dihubungkan dengan pembangunan yang dilaksanakan oleh negara-negara sedang berkembang (www.ekonomirakyat.org).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam rangka untuk mendapatkan hasil penelitian yang memadai, jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni sebagai prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan cara memaparkan keadaan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang ada atau aktual pada saat sekarang (Rakhmat,1989:30). Tema penelitian ini adalah “Konsep Yayasan Pondok Rakyat (YPR) dalam Kerja Pendampingan dan Pemberdayaan dengan Mengkaji Program Srawung Kampung”. Guna mengetahui peran lembaga tersebut. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tehnik *descriptive qualitative research*.

Tehnik “*descriptive qualitative research*” pada prinsipnya adalah untuk membuat suatu pencandraan secara sistimatis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Sedangkan secara harafiah penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi

mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Dalam arti bahwa penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar yang semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling berhubungan, menguji hipotesis, atau mendapatkan makna dan implikasi dari sesuatu (Suryabrata, 1983: 18-19).

Selain itu dalam “*descriptive qualitative research*”. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan berupa angka-angka, hal ini disebabkan oleh karena penerapan metode kualitatif, sehingga semua data yang dikumpulkan berkemungkinan akan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti. Dengan demikian laporan berisikan kutipan-kutipan tentang data guna memberi gambaran utuh dalam penyajian laporan tersebut (Moleong, 1989: 6).

2. **Subyek Penelitian**

Subyek penelitian adalah Yayasan Pondok Rakyat (YPR) yang dalam hal ini fokusnya pada salah satu program kerjanya, yaitu pendampingan, penataan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat perkampungan Kota.

4. **Sumber Data.**

a. Data Primer

Diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan beberapa relawan pendamping Yayasan Pondok Rakyat.

b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diambil dari sumber dan biasanya data itu sudah dikompilasikan lebih dahulu pada instansi atau lembaga yang punya

data. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan pengurus serta penanggung jawab program dari Yayasan Pondok Rakyat.

5. **Teknik Pengumpulan Data**

a) Wawancara.

Pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada para relawan pendamping dan penanggung jawab program Yayasan Pondok Rakyat (YPR) Jogjakarta, khususnya yang bekerja pada program acara sawung kampung. Seperti para relawan yang dilapangan saat program sawung kampung itu dilaksanakan, koordinator lapangan serta staff harian pondok rakyat itu sendiri.

b) Pengamatan

Tehnik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan ini dilakukan bersifat *sesi partisipasi aktif*. Dimana peneliti melakukan kunjungan dan ikut terjun langsung dalam usaha pemberdayaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Yayasan Pondok Rakyat di kampung Bumen Paseko.

6. **Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema. Analisis data

dilakukan dengan mengatur, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan (Nawawi dan Martumi,1992: 42).

Jenis penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif dalam analisis datanya, menurut Nawawi dan Martumi (1992 49), analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis yang menunjukkan kualitas dari suatu yang ada. Melalui beberapa tahapan, mulai dari tahap pengolahan data, pengorganisasian data, dan tahap penemuan hasil berdasarkan data primer dan sekunder. Diharapkan akan memperoleh hasil penelitian yang cermat.

Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penulisan yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati (Rahmat, 1993:73).

Analisis bentuk kualitatif ini digunakan dengan tujuan berusaha untuk menerangkan dalam bentuk bentuk uraian, sehingga data tersebut tidak berbentuk angka-angka melainkan berbentuk penjelasan yang menggambarkan keadaan dan proses peristiwa tertentu (Rahmat, 1993:77).

Tahap-tahap melakukan analisis data secara kualitatif yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu upaya menyusun, merangkum hal-hal yang pokok untuk disusun secara sistimatis sehingga mudah untuk dipahami. Upaya ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang terjadi tentang hasil penelitian, sehingga bisa dilakukan upaya penyempurnaan. Proses ini berlangsung terus menerus selama

penelitian kualitatif masih dilaksanakan. Yaitu sebelum terjun ke lapangan sampai selesai dari lapangan. Cara-cara reduksi data ini berlangsung secara ketat, membuat ringkasan atau uraian singkat.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data dalam penelitian kali ini adalah deskriptif tentang suatu lembaga dalam memberikan perannya di masyarakat khususnya warga kampung Bumen.

Kesimpulan

Dari permulaan pengumpulan data seorang peneliti, mulai mencari arti dari lapangan. Pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang menggunakan alur sebab-akibat dan proposisi dari pengumpulan data tersebut, peneliti membuat kesimpulan sementara. Hasil dari analisis data digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian kali ini. Kemudian setelah selesai melakukan penelitian. Peneliti baru membuat kesimpulan.